

# Terlibat Korupsi, Kejari TTU Tahan Tiga Tersangka Kasus Alkes



**Realitarakyat.com** – Senin (15/03/2021) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), akhirnya menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada RSUD Kefamenanu Tahun 2015 lalu.

Tiga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diantaranya YMDEB selaku Pejabat Pembuat Komitmen, MES selaku panitia dan Direktur CV. Berkat Mandiri, OJM.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten TTU, Robert Jimmy Lambila, S. H, M. H ketika dihubungi wartawan perteleponan, Senin (15/03/2021) malam.

Dijelaskan Lambila, sebelum ditetapkan dan ditahan, ketiga tersangka diperiksa oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kabupaten TTU.

Usai dilakukan pemeriksaan, lanjutnya, para tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang telah disiapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten TTU.

“Sebelum ditahan, ketiga tersangka diperiksa kesehatannya. Hasil pemeriksaan oleh tim medis, dinyatakan sehat dan layak untuk dilakukan penahanan,” jelas jaksa terbaik ini.

” ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di RSUD Kefamenanu tahun 2015 lalu,” tambah Lambila.

Dijelaskan Lambila, dalam pelaksanaan proyek tersebut terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan dua unit Blood Bank Refrigerator untuk 2 item barang tersebut sebesar Rp. 425.000.000.

Untuk sementara, kata Lambila, ketiga tersangka dititipkan di tahanan Polres TTU. Penahanan dilakukan untuk 20 hari mendatang. Dan, sesegera mungkin berkas perkara, barang bukti dan tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang.

Menurut mantan Kasi Dik Kejati NTT ini, perbuatan para tersangka diatur dan diancam dalam pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (rey)